



**KRISNADI SETYAWAN**

## Pengawal Keistimewaan, Tegas Menolak Bisnis Miras



**DPRD  
KOTA YOGYAKARTA**

**YOGYA (KR)** - Warga Rotowijayan Kraton, Krisnadi Setyawan, kembali mendapat amanah di DPRD Kota Yogyakarta masa bakti 2024-2029. Pria yang juga aktif sebagai pengawal Keistimewaan Yogyakarta ini secara tegas menolak bisnis minuman keras (miras) yang ada di Kota Yogya.

Melalui Sekber Keistimewaan, Krisnadi pada waktu itu getol mengawal Undang-undang Keistimewaan (UUK) yang akhirnya dapat disahkan. Salah satu amanah dalam UUK ialah digelontorkannya dana keistimewaan (danais) yang seharusnya bisa menjadi investasi sosial, ekonomi dan budaya. "Tetapi ketika justru marak atau bermunculan bisnis miras tentu ini menjadi hal yang kontradiktif dan harus disikapi bersama," tandasnya.

Dirinya lantas melihatnya dari sudut pandang liberalisasi pariwisata. Industri pariwisata memang menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di Kota Yogya. Idealnya setiap sekian persen pertumbuhan ekonomi seharusnya selaras dengan terbukanya lapangan pekerjaan. "Apakah isu miras juga seperti itu. Dengan dalih kurangnya lapangan kerja kemudian sebaran miras ini diizinkan. Jangan sampai isunya wisata tapi industri yang ditumbuhkan justru yang berdampak negatif di masyarakat," urai politisi dari Partai Gerindra ini.

Aktivis relawan buruh dan relawan kebencanaan ini rencananya akan duduk di Komisi B yang membidangi masalah ekonomi maupun pariwisata. Oleh karena itu Krisnadi sudah menyiapkan langkah untuk menelisik pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat namun realitas saat ini angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan masih belum terentaskan. Sehingga dalam setiap rapat kerja bersama mitra eksekutif, dirinya akan mengawal realisasi APBD agar berbasis investasi di samping mencukupi kebutuhan dasar masyarakat.

Hal ini karena banyak ekonomi kreatif yang tumbuh sendiri di masyarakat tanpa dukungan APBD. Beberapa program yang didanai pemerintah dan digadang menjadi pengungkit ekonomi namun justru hasilnya sama sekali tidak terlihat. Sebagai contoh penataan Kotabaru di kawasan Jalan Suroto namun yang tumbuh justru di kawasan lain yang tidak tersentuh penataan. Kemudian penataan Malioboro yang justru mematikan ekonomi PKL. "Tentu harus jeli dan kreatif dalam mengalokasikan APBD yang berbasis investasi. Sehingga APBD harus benar-benar menjalankan roda ekonomi yang baik, bukan sebaliknya," tandas pria 42 tahun ini.

(Dhi)-d



KR-Archi Wahdan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005